Politik Dan Strategi Nasional

A. Pengertian Politik, Sistem Politik, dan Politik Strategi Nasional

**A.1 Pengertian Politik**

Secara Etimologis istilah “politik” berasal dari kata dalam bahasa Yunani Kuno *Politea* yakni *polis* yang artinya adalah negara kota. dengan kata lain *polis* berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, kemudian *teia* yang berarti urusan. Dalam Bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. *Politics* dan *Policy* memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. *Politics* memberikan asas, jalan, arah dan medannya, sedangkan *policy* memberikan pertimbangan cara pelaksanaan, asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Menurut Carl Schmitt Politik adalah alat untuk membedakan antara kawan dan lawan. Menurutnya hubungan kawan dan lawan inilah yang menjadi essensi politik. F. Isjwara mendefinisikan ilmu politik kedalam tiga golongan , yaitu :

1. Pendefinisian secara institusional (mempelajari lembaga-lembaga politik)
2. Pendefinisian secara fungsional (disamping mempelajari lembaga-lembaga politik juga dipelajari fungsi-fungsi lembaga politik tersebut)
3. Pendefinisian secara hakekat politik, yakni kekeuasaan (power) sebagai objeknya

 Lebih lanjut dapat diperbandingkan dengan pendefinisian yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo :

|  |  |
| --- | --- |
| F. Isjwara | Miriam Budiardjo |
| * Institusionil
* Fungsionil
* Hakekat Politik
 | * Negara *(State*)
* Kekuasaan (*Power*)
* Pengambilan Keputusan (*decision Making*)
* Kebijaksanaan (*Policy*, *Beleid*)
* Pembagiam (Distribution) atau Alokasi (*Allocation*)
 |

Ilmu Politik memberikan tekanan studi pada aspek-aspek : negara/ pemerintah, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pengambilan/ alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, sera berdasarkan pendefinisian ilmu politik dapat pula dikemukakan ruang lingkup ilmu politik yang meliputi : Teori politik, lembaga-lembaga politik, dinamika politik (kehidupan politik dalam masyarakat/ infra struktur politik) dan hubungan Internasional.

**A.2 Pengertian Sistem Politik**

 Sistem politik merupakan rangkaian cara dalam mencapai suatu tujuan yang melingkupi bidang politik, termasuk lembaga-lembaga yang berfungsi dibidang politik yang keberadaannya berhubungan dengan masalah politik (kondisi) atau kehidupan kenegaraan. Sistem politik meliputi segenap kegiatan yang menentukan kebijakan bagaimana sasaran itu ingin dicapai sehingga ada bebagai pendekatan yang perlu diperhatikan.

1. Pendekatan Strutur

Pendekatan strutur adalah suatu keseluruhan dari pengelompokkan yang timbul dalam masyarakat, baik berupa lembaga kenegaraan maupun lembaga masyarakat yang berpengaruh dalam suatu pembuatan kebijakan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan mengikat segenap masyarakat.

1. Pendekatan Praktis (proses)

Pendekatan ini merupakan interaksi antara bentuk struktur yang satu dengan lainnya yang tidak terpisah dari masyarakat. secara fungsional, suatu proses politik dapat dinilai sebagai berlangsungnya suatu interaksi yang timbal balik antara fungsi masukan (input) dan keluaran (output) yang disumbangkan oleh semua pihak dari struktur yang ada.

1. Pendekatan Budaya Politik

Pendekatan ini merupakan nilai-nilai rohaniah yang menggambarkan tingkah laku baik bangsa maupun lembaga-lembaga yang menata kehidupan politik, dimana aspek suatu budaya (menyangkut masalah sistem hukum termasuk adat, sistem religi, bahasa filsafat bangsa dan sejarah bangsa) sangat berperan untuk menetapkan suatu budaya politik bagi suatu bangsa.

**A.3 Pengertian Politik Dan Strategi Nasional**

 Politik Nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikan definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pemgembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi startegi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

**B. Pengertian Strategi dan Strategi Nasional**

**B.1 Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai *“the art of* *the general”* atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.. Karl Von Clausewitz (1780 – 1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

 Dalam abad modern ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan , tetapi sudah digunakan secara luas , termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

 Dengan demikian strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas kesegala bidang kehidupan . strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi,politik,ekonomi,sosial-budaya,dan hankam)untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

**B.2 Pengertian Strategi Nasional**

Seperti yang telah djelaskan pada pengertian politik dan strategi nasional yang sangat berelasi erat**,** Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi startegi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional

**C. Dasar Pemikiran politik Strategi Nasional**

 Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.

 Politik dan dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan badan-badan yang cakupan pranata politiknya yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan disebut *“infrastruktur politik”*. dalam hal ini suprastruktur dan infrastruktur politik harus adapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik harus diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini. presiden dibantu oleh beberapa lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan stabilitas Ekonomi nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan.

Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Sedangkan proses politik dan strategi nasional pada tingkat infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.